



WAHANA

PENDIDIKAN

ISSN No. 1410-606X

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH

Volume 12, Nomor 2, April 2006

Accelerating Students' Speaking Ability Through Assignment on Communication With Native Speakers

U.D. Guntoro

Kontribusi Teori Penerjemahan Terhadap
Pencapaian Kemampuan Bilingual-
Multilingual

Wawan Tarwana

Peran Sosiolingustik dalam
Penerjemahan

Yudi Rakhman

Creating Communicative Language Class:
An Application Of Harmer's Viewpoint Of
Communicative Activities

Asep Dudi Kurnia

Budaya dan Organisasi Sekolah dalam
Era Perubahan yang Terus Menerus

Nono Mulyono

Bimbingan Karier di SMA Sebagai
Persiapan ke Arah Dunia Kerja

Iis Rosmiati dan Nono M

Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum
pada Perguruan Tinggi

Endin Lidinillah

Pengaruh Pendekatan Pembelajaran
Behavioristik dan Humanistik dalam

Pendidikan Jasmani Terhadap Sikap
Disiplin dan Tanggungjawab Siswa

Heri Yusuf Muslih

Peranan Struktur Pengendalian Intern
Biaya Tenaga Kerja dalam Meningkatkan
Efisiensi pada Perusahaan Sale Pisang
Sandy Majenang

Ade Suherman

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan
dalam Menghadapi Perkembangan Jaman

Agus Gunawan

Upaya Mempertahankan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Agus Budiman

Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Terhadap Pergeseran
Sstem Nilai-Norma yang Ada di
Masyarakat (Suatu Tinjauan Ilmu Sosial
Kritik)

Agus Gunawan

Hubungan Perilaku Pelayanan dengan
Kepuasan Konsumen pada Perusahaan
Jasa di Wilayah Priangan Timur Jawa
Barat

Nanan Supriatna

Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani

Nana Sutisna

VOLUME 12, NOMOR 2, OKTOBER 2006

PENGELOLA MAJALAH ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN

Pelindung: Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis, Rektor Universitas Galuh ■
Pengelola Jurnal: Ketua Pengarah: Drs. H. Yat Rosvia Brata, M.Si ■ **Anggota Pengarah:** Ir. Budi Setia, MM, Drs. Awang Kustiawan, MM ■ **Ketua Penyunting:** Dr. Suherli M.Pd ■ **Penyunting Ahli:** Dr. Suherli, M.Pd. (Prodi. Bahasa Indonesia), Drs. Iskhak Said, MM., M.Pd (Prodi. Bahasa Inggris), Nana Sutrisna, S.Pd. (Prodi. PJKR), Drs. Uu Adkur Sutendi, M.Pd. (Prodi. Akuntansi), Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. (Prodi. Sejarah), Drs. Endang Hardi (Prodi Biologi) Dra. Dedeh Rukaesih, M.Pd. (Prodi. Akta Mengajar) ■ **Penyunting Pelaksana:** Endin Lidinillah, M.Ag ■ **Ketua Redaksi:** Drs. Ikin Syamsudin, M.Pd ■ **Sekretaris Redaksi:** Idan Residan, SE ■ **Keuangan:** Yuyud Sutardi, SE ■
Sirkulasi: Eman Sulaeman, Deni Sariman

Wahana Pendidikan adalah majalah ilmiah yang diterbitkan berdasarkan
 Surat Izin Terbit No. 2126/SK/Ditjen/STT/1995

dan Rekomendasi Kopertis IV No. 1382/Kop.IV/1/1995.

Terbit 2 kali setahun pada bulan April dan Oktober. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, dan ulasan buku di bidang pendidikan.



Diterbitkan oleh:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

Alamat Redaksi:

Jl. RE Martadinata 150 Ciamis 46211 Telp. (0265) 772192 Fax. 771955



Wahana Pendidikan diterbitkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

Majalah Ilmiah Wahana Pendidikan mengundang para pakar dan civitas akademika Perguruan Tinggi untuk menulis artikel ilmiah yang berkaitan dengan wilayah kajian pendidikan. Naskah yang masuk disunting oleh penyunting ahli. Penyunting berhak melakukan perubahan/suntingan tanpa mengubah isinya.

VOLUME 12
NOMOR 2
OKTOBER
2006

WAHANA
PENDIDIKAN
MAJALAH ILMIAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH

ISSN No. 1410-606X

DAFTAR ISI

U.D. Guntoro	34-41	Accelerating Students' Speaking Ability Through Assignment on Communication With Native Speakers
Wawan Tarwana	42-44	Kontribusi Teori Penerjemahan Terhadap Pencapaian Kemampuan Bilingual-Multilingual
Yudi Rakhman	45-50	Peran Sociolinguistik dalam Penerjemahan
Asep Dudi Kurnia	51-53	Creating Communicative Language Class: An Application Of Harmer's Viewpoint Of Communicative Activities
Nono Mulyono	54-63	Budaya dan Organisasi Sekolah dalam Era Perubahan yang Terus Menerus
Iis Rosmiati dan Nono M	64-68	Bimbingan Karier di SMA Sebagai Persiapan ke Arah Dunia Kerja
Endin Lidinillah	69-76	Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum pada Perguruan Tinggi
Nana Sutisna	77-79	Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani
Heri Yusuf Muslihin	80-89	Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Behavioristik dan Humanistik dalam Pendidikan Jasmani Terhadap Sikap Disiplin dan Tanggungjawab Siswa
Ade Suherman	90-93	Peranan Struktur Pengendalian Intern Biaya Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Efisiensi pada Perusahaan Sale Pisang Sandy Majenang
Agus Gunawan	94-96	Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Menghadapi Perkembangan Jaman
Agus Budiman	97-99	Upaya Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Agus Gunawan	100-102	Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pergeseran Sstem Nilai-Norma yang Ada di Masyarakat (Suatu Tinjauan Ilmu Sosial Kritik)
Nanan Supriatna	103-110	Hubungan Perilaku Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen pada Perusahaan Jasa di Wilayah Priangan Timur Jawa Barat

UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

✉ Oleh : AGUS BUQIMAN

ABSTRAK

Wacana persatuan dan kesatuan dewasa ini menjadi masalah vital sehubungan sudah lepasnya bagian integral Negara kita yang dimulai dari Timor – Timur, kemudian Sipadan dan Ligitan serta konflik yang terjadi baik vertikal dari Aceh dan Papua maupun yang horizontal seperti di Kalbar, Poso dan daerah-daerah lainnya yang mengindikasikan bahwa persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan agar tetap terjaminnya persatuan dan kesatuan NKRI, salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah mempertahankan wilayah NKRI tetap eksis dan tidak lepas satu persatu ke tangan negara lain baik yang disekitar wilayah kita maupun di luar wilayah kita.

PENDAHULUAN

Perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan membentuk suatu negara akhirnya dapat diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditanda langani dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno – Hatta. Kita patut memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada para pendahulu (*the founding fathers*) yang telah mewariskan suatu wilayah Negara demikian luas, terletak pada posisi silang dunia yang strategis dan terdiri dari tujuh belas ribu pulau lebih dengan panjang garis pantai mencapai 81.000km serta luas wilayah perairan 7.9 juta KM². diantara ribuan pulau tersebut terdapat pulau – pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun tidak, merupakan titik – titik terluas batas

wilayah negara, dimana dari pulau-pulau tersebut ada yang berbatasan dengan negara tetangga dan dapat menimbulkan konflik perbatasan.

Kasus lepasnya pulau Sipadan Ligitan merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan dapat menjadi yurisprudensi dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang berainggungan dengan kepentingan nasional Negara lain. Keputusan *Internasional Court of Justice (ICJ)* di Den Haag pada tanggal 17 Desember 2002 didasarkan kepada pertimbangan yang merupakan prinsip "*effective occupation*", dimana pertimbangan tersebut telah menggunakan argumentasi hukum yang diajukan oleh Indonesia maupun Malaysia. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa Malaysia didalam upayanya untuk memenangkan kasus tersebut, menggunakan seluruh instrumen nasionalnya (politik, ekonomi, dan

militer) yang dikenal dengan sebutan "*deference activities*", karena memang pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kepentingan nasional mereka.

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Komponen-komponen apa yang telah dimainkan untuk memenangkan pulau Sipadan – Ligitan? Banyak komentar dan pendapat dilontarkan justru setelah ada keputusan dari ICJ. Barangkali memang kita kurang memiliki rasa "kepedulian" terhadap masalah kedaulatan nasional, kita baru tercengang atau berkomentar setelah segala sesuatunya terjadi. Untuk itu kiranya memang dibutuhkan kepedulian seluruh komponen bangsa agar kasus Sipadan – Ligitan tidak terulang lagi dikelak kemudian hari dan kita dapat mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PEMBAHASAN

a. Hukum

Melalui UU No. 17 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 Indonesia meratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang berlaku secara resmi diseluruh dunia sejak tanggal 18 Nopember 1984, maka secara yuridis formal Indonesia telah diakui sebagai Negara kepulauan. Untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia

sebagai Negara kepulauan, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 6 tahun 1996 tentang peraliran Indonesia sebagai pengganti UU No. 4 PRP tahun 1960.

Tujuh tahun kemudian, melalui Penetapan Pemerintah (PP) Nomor : 36 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Daftar koordinat Geografi Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, batas wilayah jurisdiksi Negara kepulauan Indonesia ditetapkan, termasuk didalamnya Pulau Sipadan (titik dasar No.036 S) dan Pulau Ligitan (titik dasar No : 336 B dan 036 C). Peraturan Pemerintah tersebut belum diterjemahkan kedalam bahasa Inggris untuk disosialisasikan kepada masyarakat internasional dan memerlukan revisi.

b. Pulau-pulau terluar

Hasil ujian sementara yang telah dilakukan oleh TNI-AL, ditemukan sebanyak 67 buah pulau-pulau kecil yang sekaligus menjadi titik terluar batas wilayah NKRI. Dari ke-67 pulau tersebut, 10 pulau diantaranya memiliki kerawanan dan dianggap memungkinkan/dapat menjadi sumber konflik perbatasan dengan Negara tetangga bila tidak diantisipasi sejak dini. Pulau-pulau yang berbatasan dengan Negara tersebut adalah :

1. Pulau Rondo yang berada di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD), berbatasan dengan India, tidak ada penduduk, namun sudah ada Mercuri Suar yang dibangun oleh pemerintah RI.
2. Pulau berhala yang berada di Provinsi Sumatera Utara, berbatasan dengan Malaysia, tidak ada penduduk, namun sudah Mercuri Suar yang dibangun oleh pemerintah RI.
3. Pulau Nipa di Propinsi Riau, berbatasan dengan Singapura, tidak ada penduduk, Mercuri Suar yang dibangun oleh pemerintah RI. Pulau ini perlu segera ditangani secara serius, karena dengan adanya aktifitas penambangan pasir laut yang berlebihan sehingga menghampertenggelam. Bila

pulau Nipa ini tenggelam, maka akan berpengaruh terhadap batas Negara NKRI-Singapura.

4. Pulau Sekatung di Provinsi Riau, berbatasan dengan Vietnam, tidak ada penduduk, namun Mercuri Suar yang dibangun oleh pemerintah RI.
5. Pulau Marore dan Miangas berada di Provinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina, ada penduduk dan sudah ada Suar yang dibangun oleh pemerintah RI.
6. Pulau Fanildo dan Pulau Bras (pulau-pulau Mapia) serta pulau fani di Provinsi Papua, berbatasan dengan Negara Palau. Pulau Fani dan pulau Fanildo tidak berpenduduk dan belum ada suar, sedangkan pulau Bras berpenduduk dan ada bangunan Suar yang didirikan oleh Pemerintah RI.
7. Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berbatasan dengan Timor Lorosae, tidak berpenduduk, saat ini sedang dibangun Suar oleh Pemerintah.

c. Perbatasan Wilayah laut

Hingga saat ini, masih terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga yang belum diselesaikan secara lunas. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati, namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut (nelayan tradisional)

1. Indonesia dan Singapura memiliki ganjalan tentang batas laut teritorial, walupun sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua Negara. Namun demikian, terdapat kekhawatiran adanya perubahan batas kedua Negara. Namun demikian, terdapat kekhawatiran adanya perubahan batas kedua Negara diselat Malaka sebagai dampak dari kegiatan. Reklamasi yang dilakukan Singapura yang nota bene menggunakan pasir laut dari Indonesia. Penambangan pasir laut yang berlebihan juga

berdampak kepada tenggelamnya pulau Nipa yang merupakan titik dasar dalam penentuan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.

2. Indonesia dan Malaysia memiliki masalah perbedaan pemahaman rejim laut dibagian utara selat Malaka, selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Disisi lain, dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan juga akan mempengaruhi penelapan batas wilayah perairan sebelah Timur Pulau Sebatik.
3. Indonesia dengan Australia, pasca kemerdekaan Timor Lorosae, garis batas laut perlu penataan ulang, walaupun persetujuan garis batas landas kontinen pernah dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1972 serta persetujuan garis batas ZEE pada tahun 1981
4. Indonesia dengan Philipina memiliki perbedaan secara fundamental mengenai penetapan batas wilayah lautnya, meskipun Philipina juga menganut konsep Negara kepulauan seperti Indonesia.
5. Indonesia dengan Vietnam mempunyai perbedaan pemahaman tentang landas kontinen di perairan antara Pulau Sekatung di kepulauan Natuna dan Pulau Kondor di Vietnam, sehingga terjadi "overlapping".
6. Indonesia dengan RRC, terdapat perbedaan pandangan batas perairan, khususnya di perairan Natuna. Pada tanggal 25 Februari 1992, RRC mengumumkan hukum laut teritorial dan Zona tambahan, dimana kepulauan Natuna dimasukkan kedalam wilayahnya. Walaupun hal ini telah dikoreksi oleh RRC, namun potensi konflik masih belum dapat dikatakan hilang sama sekali.
7. Indonesia dengan India juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar pulau Andaman Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh para nelayan Aceh.

konsumen, tungkinkan perbedaan an antara yang satu n jasa-jasa mah makan, lain.

REFERENSI

olved control counter, In on, M. and Eds), *The Mana-ging r Interaction asses*, DC AA, pp. 67-

1992). *The idity of ides and ulating the Journal of* Vol. 19 No.

1, E. (1982). *if common appraisal of* II, A. (Ed.), *Consumer oculation for* 1, Chicago,

d Tetreault, *service g favorable incidents* Vol. 54 No.

(1990). *The co-respect uth*". Soan Winter, pp.

d Koehier, *attributes ty and faith-care h Care*

- B. Indonesia dengan Timor Lorosae, sampai dengan saat ini belum mempunyai perjanjian batas wilayah laut. Dalam konteks ini keberadaan pulau Batek perlu mendapatkan perhatian, disisi lain pasca kemerdekaan Timor Lorosae juga membawa dampak terhadap perjanjian pengelolaan celah Timor.
9. Indonesia dengan PNG telah memiliki kesepakatan tentang batas-batas wilayah darat dan perairan. Namun demikian terdapat beberapa aspek cultural yang berpotensi menjadi konflik, dimana kesamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar desa yang berada di kedua sisi perbatasan menimbulkan adanya klaim terhadap hak-hak tradisional dan berkembang menjadi lebih kompleks.
10. Indonesia dengan Negara Palau belum sependapat mengenai batas ZEE kedua Negara, terutama dipulau-pulau Asia dan pulau-pulau Mapia. Pemerintah Indonesia tetap melihat hubungan bilateral yang terjalin dengan baik selama ini sebagai suatu hal yang sangat berharga dan perlu dipertahankan. Sikap Indonesia seperti ini, bila tidak diwaspadai akan berubah menjadi boomerang dikemudian hari, karena tidak ada persahabatan yang abadi melainkan kepentingan yang abadi. Ingat akan kasus pulau Sipadan dan Ligitan.

UPAYA MEMPERTAHANKAN NKRI

Memperhatikan kondisi wilayah NKRI sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan upaya-upaya nyata yang dapat mendukung tetap tegak dan utuhnya wilayah NKRI. Beberapa upaya di bawah ini, sebagai sumbang saran kepada pemerintah, barang kali patut dipertimbangan untuk direalisasikan, sebagai berikut :

- a. Menata kembali arsip-arsip maupun dokumen sejarah, khususnya menyangkut dokumen wilayah kekuasaan Hindia - Belanda dan perjanjian perbatasan yang pernah dibuat dengan negara tetangga. Hal ini penting untuk diindak lanjuti mengingat betapa lemahnya sistem pengarsipan dinegara kita, disisi lain dokumen tersebut sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa perbatasan Negara lain.
- b. Menyempurnakan kembali produk undang-undang yang mengatur tentang batas wilayah NKRI (UU No. 6 tahun 1996, PP No.38 tahun 2002 dan UU lain yang harus dibuat sesuai dengan UNCLOS 82), selanjutnya produk UU tersebut disampaikan kesekretariatan PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional.
- c. Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya, khususnya pengelolaan pulau-pulau kecil (terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga). Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan aspek ekonomi, social budaya maupun aspek. Pertahankan keamanan seiring dengan perkembangan otonomi daerah.
- Menggalakan sosialisasi dan implementasi Wawasan Nusantara yang juga merupakan wawasan nasional Indonesia sebagai upaya membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah NKRI.

PENUTUP

Sudah menjadi kewajiban bagi kita sekalian selaku anak bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dan mengamankannya dari pihak-pihak yang bermaksud tidak baik. Setetes air dan sejenkal tanah harus kita

pertahankan sampai titik darah penghabisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basric, Chaidir, (2002), *Politik dan Strategi Nasional Perwujudannya dalam Penyelenggaraan Berbangsa dan Bermegara*, Jakarta: LEMHANAS
- CST Cansil dan Chnstinc, (2002), *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Nasution, A.H, (1980), *Pokok-Pokok Gornya dan Pertahanan RI di Masa Lalu dan yang Akan Datang*, Bandung: Angkasa
- Pokja Geostrategi dan Tarnas, (2003), *Ketahanan Nasional*, Jakarta: LEMHANAS
- Staf Pertahanan Keamanan, (1967), *Tentang Doktrin Pertahanan, Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI, Catur Dharma Fakta Karma*, Jakarta: TP
- UU RI Tahun 2002 tentang *Pertahanan Nasional*, Jakarta: Departemen Pertahanan RI

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Agus Budiman, S.Pd, lahir di Jakarta, 20 Agustus 1971. Lulusan S1 Unigai tahun 1999. Lulusan Suscadoswar - LEMHANNAS RI Angkatan 47 tahun 2003 di Jakarta Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Antropologi di FKIP Unigai Ciamis dan Dosen tetap Yayasan Universitas Galuh Ciamis.